

LAPORAN KINERJA

2021



KPKNL
PALOPO

"IDAMAN" IKHLAS DALAM MELAYANI



PENJELASAN
UMUM



PERENCANAAN
KINERJA



AKUNTABILITAS
KINERJA

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Palopo disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Palopo di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIN KPKNL Palopo tahun 2021 disusun berdasar dan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan di atas, serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi DJKN yaitu Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan Misi Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara; Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

LAKIN KPKNL Palopo Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Balance Score Card (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Palopo melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Palopo tahun 2021. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 113,99% dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergi semua pihak baik di internal, maupun dengan semua *stakeholders* di lingkungan KPKNL Palopo.

Demikian LAKIN ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Palopo khususnya di tahun 2021. LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai sarana pembinaan, pengendalian, dan

pengevaluasian, serta penilaian kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palopo.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo. Kami juga berterima kasih atas segala saran, masukan dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di masa-masa mendatang.

Palopo, 27 Januari 2022

Kepala Kantor,





DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	.iii
Ikhtisar Eksekutifiv
BAB I PENDAHULUAN1
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	.1
B. Peran Strategi KPKNL Palopo6
C. Isu Strategis Organisasi.....	.7
D. Permasalahan Utama8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian IKU	14
B. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP	52
Lampiran	53



IKHTISAR EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Akuntabilitas Kinerja KPKNL Palopo dalam mengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang, disampaikan kepada *stakeholder* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Palopo tahun 2021. LAKIN KPKNL Palopo tahun 2021 merupakan laporan pencapaian kinerja, dimana laporan tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi KPKNL Palopo yang merupakan unit vertikal DJKN yaitu :

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang selanjutnya menjadi sarana untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam rencana kerja KPKNL Palopo, dengan mengacu pada visi dan misi DJKN kedalam rencana kegiatan. Lakin KPKNL Palopo tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan motto "Ikhlas Dalam Melayani" segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2021 dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2021, rinciannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	100.00%	120.00%
		Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang	100%	148.81%	120.00%
		Persentase penurunan outstanding piutang Negara (saldo PNDS sd. 2017)	100%	692%	120.00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan Negara dan lelang	86.00	98.11	114.08%
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	203.04%	120.00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.41	4.60	104.25%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	114.71%	114.71%
		Persentase implementasi evaluasi	100%	111.11%	111.11%



		kinerja BMN (potofolio aset)			
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0.23%	120.00%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	191.67%	120.00%
		Persentase produktifitas lelang	35.00%	37.25%	106.44%
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	100.00%	108.70%
		Deviasi data PNBP fungsional DJKN	12.50%	0.00%	120.00%
6	Edukasi yang efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	86	90.41	105.12%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%	95.83%	112.75%
8	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
9	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75%	92.61	120.00%
		Indeks efektifitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97.55	120.00%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	93.87%	98.29%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 113,99% dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB I

PENDAHULUAN



**KPKNL
PALOPO**



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

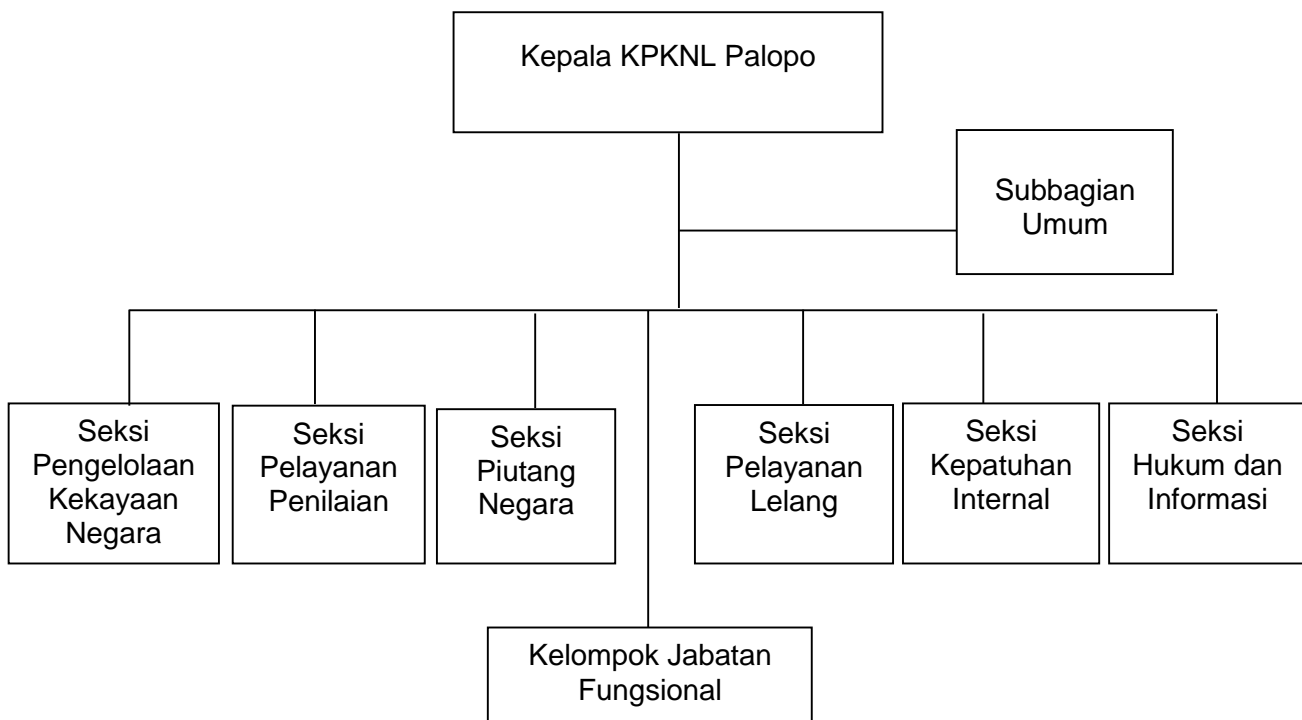
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 263/PMK.01/2016.

- a. KPKNL Palopo sebagai unit kantor operasional atau kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Palopo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), 7 Jabatan Struktural eselon IV.a (Kepala Seksi) (untuk Kepala Seksi Pelayanan Penilaian dilaksanakan oleh Pejabat Plt.), sebagaimana bagan berikut:

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo



Bagan tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL Palopo.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan Daftar Barang Milik Negara/Kekayaan Negara.
3. **Seksi Pelayanan Penilaian**, mempunyai tugas menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa



data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

4. **Seksi Piutang Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.
5. **Seksi Pelayanan Lelang**, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan dan grosse risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintenden Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
6. **Seksi Hukum dan Informasi**, mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
7. **Seksi Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Selain memiliki jabatan struktural di atas, KPKNL Gorontalo juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional tersebut antara lain:

- a. Pelelang;
- b. Penilai Pemerintah; dan
- c. Juru Sita dan Pemeriksa; berada di bawah Kasi Piutang Negara,



KPKNL Palopo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang kepada masyarakat dan *stakeholders* dengan meliputi 7 (tujuh) wilayah kerja yaitu :

1. Kota Palopo
2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Luwu Timur
5. Kabupaten Tana Toraja
6. Kabupaten Toraja Utara
7. Kabupaten Enrekang

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan Desember 2021, KPKNL Palopo didukung oleh 26 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, teknik dan lain sebagainya. Komposisi pegawai KPKNL Palopo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut:

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan jenis kelamin dan Golongan:

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	-	5	15	2	22
Perempuan	-	2	2	-	4
Total	-	7	17	2	26

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	1	-	-	1
2.	DI	-	1	-	-	1
3.	DIII	-	5	-	-	5
4.	DIV	-	-	-	-	-



5.	S1	-	-	15	-	15
6.	S2	-	-	2	2	4
TOTAL		-	7	17	2	26

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional:

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Pelelang	4
2	Penilai	2
	Total	6

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis:

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	PBJ	4
2	Pemeriksa Piutang Negara	-
3	Jurusita	4
	Total	8

Dengan adanya mutasi dan promosi para pegawai KPKNL Palopo yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN, antara lain mengakibatkan penyebaran pemeriksa piutang Negara dan juru sita di KPKNL Palopo menjadi berubah. Mengingat juru sita yang ada saat ini, dua orang pegawai sudah menempati posisi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, satu orang pegawai sudah menempati posisi sebagai Pejabat Fungsional Pelelang, dan satu orang pegawai sudah menempati posisi Kepala Sub Bagian Umum sehingga dapat dikatakan bahwa di KPKNL Palopo saat ini, kekurangan Juru Sita dan Pemeriksa Piutang Negara.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi pada KPKNL Palopo merupakan alat penunjang yang diperlukan guna menjalankan kegiatan operasional kantor. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, KPKNL Palopo saat ini menempati



sebagian (*sharing*) Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo (pinjam pakai), terletak di Jalan Andi Kambo Nomor 55, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut kondisi sarana dan prasarana KPKNL Palopo :

1. Rumah Negara

Rumah Negara yang berada di KPKNL Palopo berjumlah 8 (delapan) unit yang terdiri dari:

- a. 4 (unit) unit rumah negara terletak di Jalan K.H.Ahmad Razak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo;
- b. 1 (satu) unit rumah negara terletak di Jalan Sawerigading, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- c. 3 (tiga) unit rumah negara terletak di Jalan Pongsimpin Lorong SD, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di KPKNL Palopo berjumlah 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari

No.	KANTOR	RODA 2				RODA 4				TOTAL
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	
1	KPKNL Palopo	5	-	-	5	5	-	-	5	10

B. PERAN STRATEGIS KPKNL PALOPO

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pengelolaan BMN yaitu dengan cara melakukan optimalisasi pengelolaan BMN yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN telah dilakukan dengan cara utilisasi kekayaan Negara (PSP, pemanfaatan, pemindahtanganan dan sebagainya), pengawasan dan pengendalian BMN, pembinaan, dan penatausahaan BMN (rekonsiliasi BMN). Dilakukan juga mekanisme untuk mengukur tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dibandingkan dengan



perencanaan sesuai kebutuhan (SBSK), serta mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja BMN melalui potofolio aset.

2. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN, penilaian mempunyai peranan penting dalam menyajikan nilai yang wajar terhadap BMN tersebut, misalnya dalam rangka penyusunan LKPP, maupun pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Selain itu, selama tahun 2021, KPKNL Palopo juga telah melaksanakan penilaian aset milik pemerintah daerah (BMD) yang berada di wilayah kerja KPKNL Palopo, baik dalam rangka penetapan nilai limit untuk penjualan lelang, pemindahtanganan, maupun dalam rangka penyusunan neraca keuangan.

3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pegurusan Piutang Negara yaitu dalam rangka penyelamatan keuangan negara berupa piutang Negara, baik yang berasal dari piutang perbankan (eks BLBI), maupun non perbankan misalnya penyerahan piutang dari Kementerian/Lembaga.

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palopo terus melakukan upaya penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang.

5. Memberikan Kontribusi kepada Negara berupa PNBP

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengurusan piutang Negara dan lelang, KPKNL Palopo telah berkontribusi terhadap penerimaan Negara khususnya penerimaan bukan pajak (PNBP) berupa biad pengurusan piutang Negara dan bea lelang sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

KPKNL Palopo sebagai kantor vertikal atau disebut juga kantor operasional dari Kantor Pusat DJKN, pada tahun 2021 telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPKNL Palopo sebagaimana diamanatkan oleh Kantor Pusat DJKN, sasaran strategis sebagai berikut.



1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang *fit-for-purpose*;
10. Pengelolaan keuangan yang optimal.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan yang dihadapi KPKNL Palopo antara lain :

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, seperti mengajukan usulan penetapan status penggunaan, melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara, melakukan penyerahan Barang Milik Negara *idle* kepada Pengelola Barang, dan melakukan pemanfaatan, penjualan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, yang meliputi Barang Milik Negara belum memiliki dokumen kepemilikan, Barang Milik Negara dikuasai pihak lain, Barang Milik Negara dalam sengketa, Barang Milik Negara belum ditemukan, Barang Milik Negara yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan Barang Milik Negara rusak berat tetapi belum dihapuskan. Hal tersebut dapat menghambat proses optimalisasi dan utilisasi kekayaan negara;
3. Pelaksanaan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah terkendala oleh :
 - a. Beberapa status tanah target sertifikasi belum *clean and clear*.
 - b. Dana untuk kegiatan pendampingan sertifikasi belum tersedia di satuan kerja.



- c. Detail data tanah target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid.
4. Pemahaman peraturan yang tidak merata, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda.
5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*.
6. Kurang detailnya (penjelasan) peraturan terhadap objek penilaian yang bersifat khusus, sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya persepsi atau penafsiran yang berbeda dari para penilai, dalam menilai objek khusus tersebut.
7. Optimalisasi pengurusan piutang negara khususnya BKPN eks BLBI (BDL/BPPN) terkendala, dikarenakan BKPN tidak didukung dengan dokumen, status dan keberadaan barang jaminan.
8. Calon pembeli lelang terutama untuk lelang eksekusi hak tanggungan, masih mengalami keraguan untuk ikut lelang dikarenakan adanya ketakutan turut mendapat perlawanan/gugatan dari pihak debitur/pemilik jaminan.
9. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang belum optimal, dikarenakan oleh pihak penjual yang dalam hal ini beberapa Perbankan menjadikan pelaksanaan lelang sebagai media *shock therapy* kepada debitur agar debitur melakukan pembayaran, sehingga berujung pada pembatalan lelang oleh pihak penjual.
10. Lelang belum menjadi sarana jual beli yang utama. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahwa menggunakan jasa lelang sebagai salah satu instrumen jual beli atau sarana pencairan/penghapusan aset dan inventaris yang sangat potensial dan menguntungkan.
11. Kebijakan dan perangkat pemantauan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kepatuhan internal, secara kontinyu terus mengalami perkembangan, namun sosialisasi kepada seluruh elemen pegawai terkait dinamisasi kebijakan dan perangkat-perangkat tersebut, tidak berjalan secepat dan semassif dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Namun demikian, dengan semangat “Idaman”, Ikhlas Dalam Melayani, maka KPKNL Palopo akan memanfaatkan segala potensi yang ada, untuk dijadikan peluang yang menguntungkan, dan menjadikan permasalahan yang ada, sebagai tantangan yang memacu KPKNL Palopo untuk bekerja lebih baik lagi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



**KPKNL
PALOPO**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki. Perencanaan strategis KPKNL Palopo disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis KPKNL Palopo Tahun 2020-2024 yang dalam penyusunannya merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Rencana strategis KPKNL Palopo mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis untuk dilaksanakan setiap tahun.

1. VISI

Sebagai unit vertikal, maka visi KPKNL Palopo untuk tahun 2020-2024 mengacu pada visi DJKN 2020-2024 yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara bahwa KPKNL sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan



kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palopo sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3. TUJUAN

Tujuan KPKNL Palopo sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- 2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- 3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- 4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

4. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, KPKNL Palopo sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;



- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian kinerja pada KPKNL Palopo menetapkan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, KPKNL Palopo menetapkan 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2021. Adapun rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Palopo tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang	100%
		Persentase penurunan outstanding piutang Negara (saldo PNDP sd. 2017)	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan Negara dan lelang	86.00
		Persentase realisasi pokok lelang	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.41
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (potofolio aset)	100%
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	100%
		Persentase produktifitas lelang	35.00%



		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%
		Deviasi data PNBPF fungsional DJKN	12.50%
6	Edukasi yang efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	86
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%
8	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75%
		Indeks efektifitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



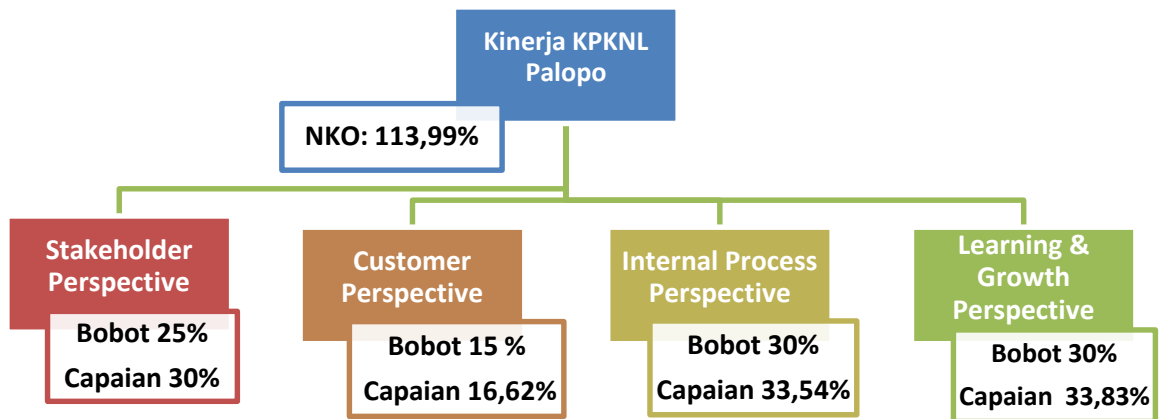
**KPKNL
PALOPO**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU

Pengukuran capaian kinerja organisasi KPKNL Palopo tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utam (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo tahun 2021 adalah sebesar 113,99%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Berikut kami tampilkan tabel capaian IKU KPKNL Palopo tahun 2021:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Index max 120 %
Stakeholder Perspective (25%)					30%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	100.00%	120.00%
		Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang	100%	148.81%	120.00%
		Persentase penurunan outstanding piutang Negara (saldo PNDP sd. 2017)	100%	692%	120.00%



Customer Perspective(15%)					16,62%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan Negara dan lelang	86.00	98.11	114.08%
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	203.04%	120.00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.41	4.60	104.25%
Internal Process Perspective (30%)					33,54%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	114.71%	114.71%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (potofolio aset)	100%	111.11%	111.11%
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0.23%	120.00%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	191.67%	120.00%
		Persentase produktifitas lelang	35.00%	37.25%	106.44%
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	100.00%	108.70%
		Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	12.50%	0.00%	120.00%
6	Edukasi yang efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	86	90.41	105.12%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%	95.83%	112.75%
Learning & Growth Perspective (30%)					33,83%



8	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
9	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75%	92.61	120.00%
		Indeks efektifitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97.55	120.00%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	93.87%	98.29%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu *Three* KPKNL Palopo Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Palopo sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Indikator Kinerja Utama :

1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Komponen kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terdiri dari:

- a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) yaitu pengukuran tingkat penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *exsisting* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sesuai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.
- b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK tahun 2020 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran tingkat penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara yang menjadi target pengukuran pada tahun 2020 yaitu Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Rumah Negara/Mess pada satker Kementerian Keuangan.

Capaian IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah sebagai berikut:

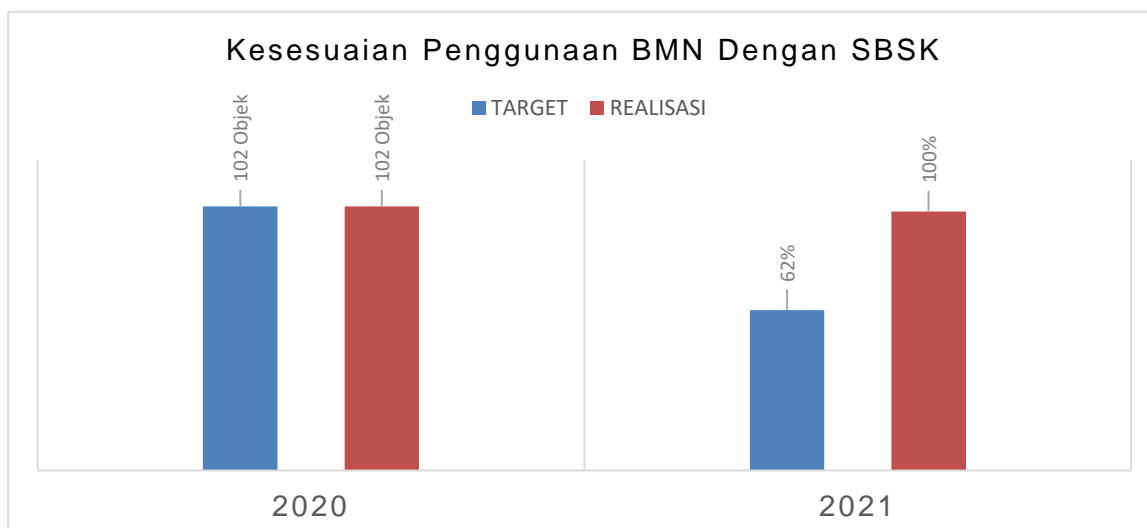


K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1a-CP- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/KP
Target		50%	50%	55%	55%	62%	62%	
Capaian		45%	45%	97.50%	97.50%	100%	100%	
Realisasi		45%	45%	97.50%	97.50%	100%	100%	
Index max 120 %		90%	90%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan satker-satker di wilayah kerja KPKNL Palopo guna memberikan edukasi yang memadai terkait pelaksanaan pengukuran tingkat penggunaan BMN sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN, baik untuk satker Kementerian Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi SBSK tahun 2020, maupun kepada satker secara umum yang menjadi target baru di tahun 2021.
- b. melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan bagi satker yang menjadi target pengukuran kesesuaian dengan SBSK di tahun 2021.

Demikian kami sampaikan perbandingan capaian/realisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dalam kurun waktu dua tahun terakhir.





2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Indikator Kinerja Utama :

1b-CP- Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN).
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- 2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN).
Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBP Lelang.
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:
 - a. bea lelang,
 - b. bea lelang pegadaian,
 - c. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
 - d. biaya permohonan lelang,
 - e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - f. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2021, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBP Aset, PN, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang telah masuk dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Capaian IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1b-CP- Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Capaian	16.18%	70.52%	70.52%	113.24%	113.24%	148.81%	148.81%	

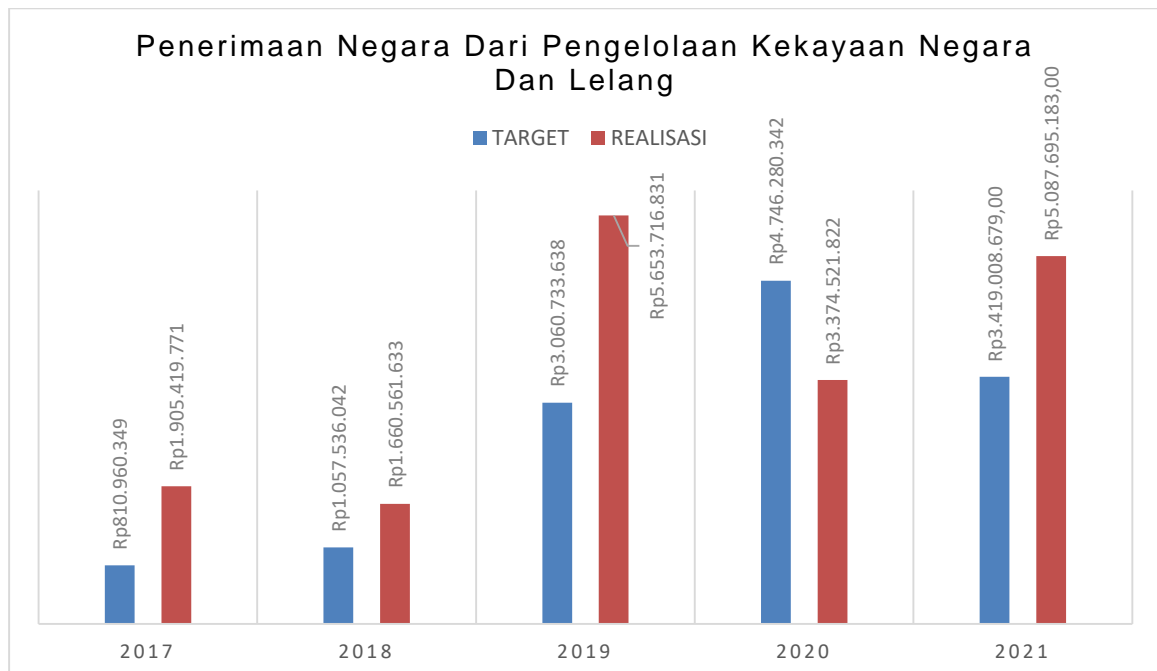


Realisasi (Rp)	553,198,330.00	2,411,133,162.00	2,411,133,162.00	3,871,553,389.58	3,871,553,389.58	5,087,695,183.00	5,087,695,183.00
Index max 120 %	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- berkoordinasi dan mendorong satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama melalui pemanfaatan BMN yang belum digunakan untuk mendukung tuisi.
- berkoordinasi dan mendorong satker untuk mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat melalui lelang penjualan BMN.
- berkoordinasi dengan KPPN terkait untuk mendapatkan data realisasi PNBP aset pada Aplikasi OM SPAN.

Demikian kami sampaikan capaian penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



3. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Indikator Kinerja Utama

1c-CP- Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan



piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya. Target capaian tahun 2021 adalah sebesar Rp51.538.654,00. Data capaian diperoleh dari Aplikasi FocusPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT):
 - a. Angsuran
 - b. Penarikan/Pengembalian
 - c. Pelunasan
 - d. PSBDT
2. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya, yang lunas pada tahun berjalan.

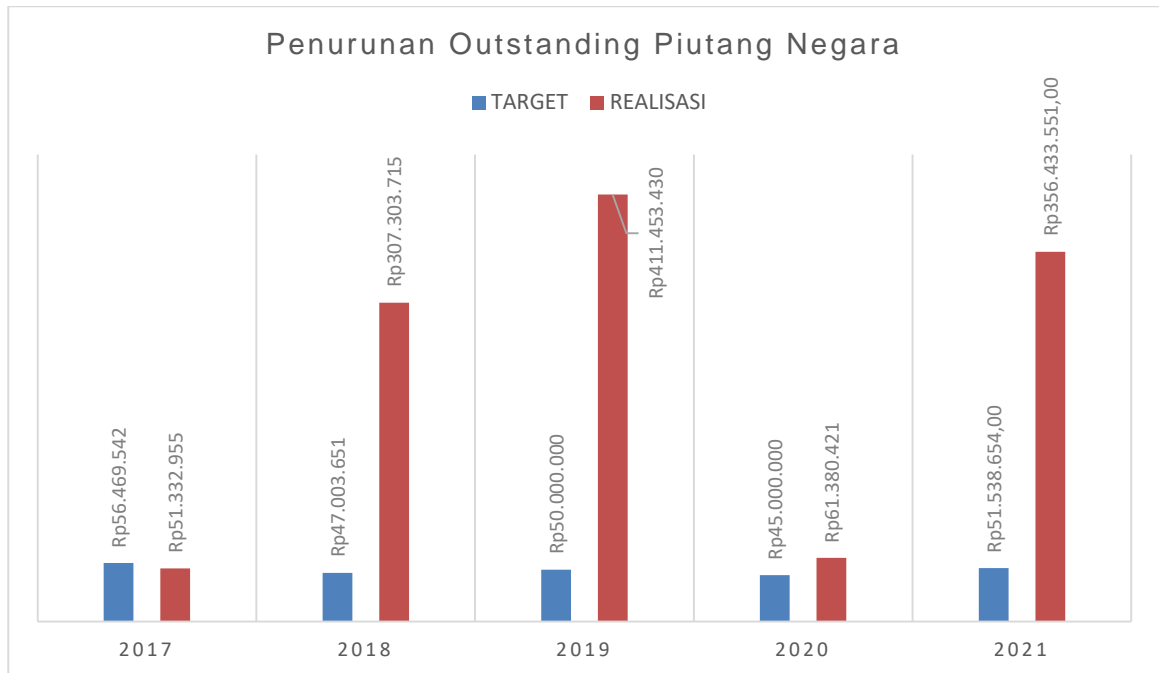
Capaian IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1c-CP- Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Capaian	20%	594%	594%	679%	679%	692%	692%	
Realisasi (Rp)	10,396,952.00	306,257,675.00	306,257,675.00	349,853,344.28	349,853,344.28	356,433,551.00	356,433,551.00	
Index max 120 %	80.69%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan secara massif terkait adanya crash program piutang Negara melalui berbagai sarana.
- b. melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.
- c. melakukan kegiatan penagihan langsung kepada debitur.

Demikian kami sampaikan capaian Penurunan outstanding piutang negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



4. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama

2a-CP- Indeks Ketepatan waktu layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Manajemen pelayanan yang berkualitas adalah serangkaian proses kegiatan dalam menata dan mengelola layanan-layanan yang diberikan kepada pengguna jasa sehingga mampu menghasilkan layanan yang memenuhi asas-asas:

- (a) kepentingan umum;
- (b) kepastian hukum;
- (c) kesamaan hak;
- (d) keseimbangan hak dan kewajiban;
- (e) keprofesionalan;
- (f) partisipatif;
- (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- (h) keterbukaan;
- (i) akuntabilitas;
- (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- (k) ketepatan waktu; dan
- (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.



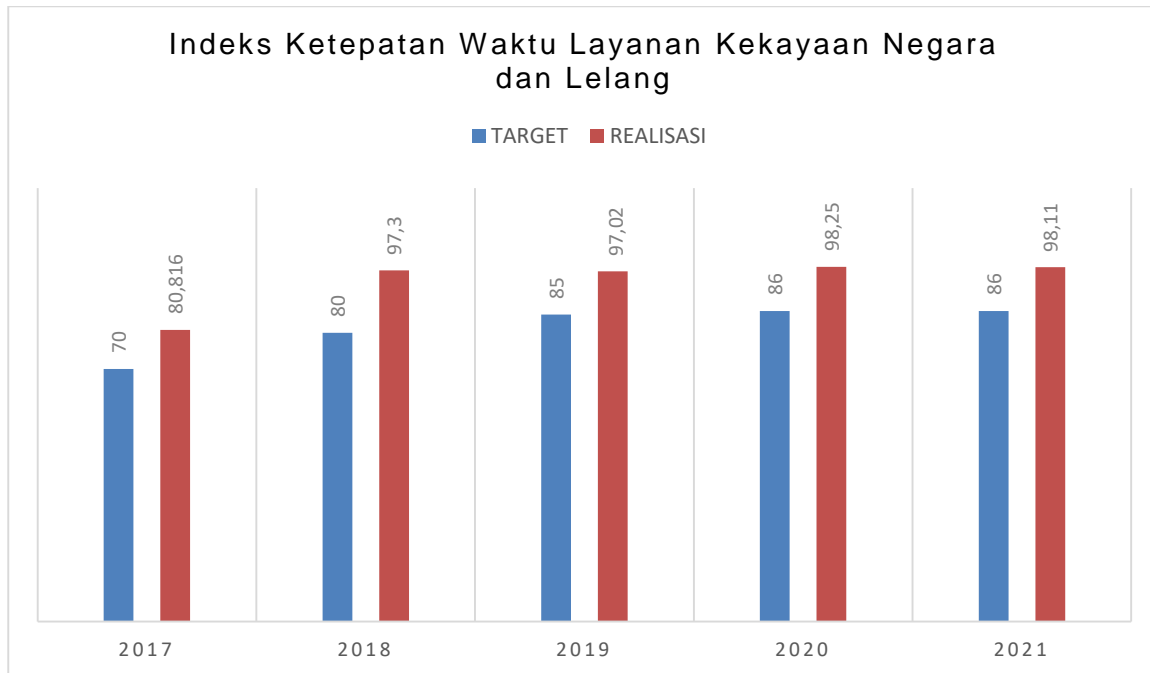
Capaian IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP- Indeks Ketepatan waktu layanan Kekayaan Negara dan Lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	Max/AVG
Capaian	98.84	99.10	98.97	95.87	97.94	98.61	98.11	
Realisasi	98.84	99.10	98.97	95.87	97.94	98.61	98.11	
Index max 120 %	114.93%	115.08%	115.08%	113.88%	113.88%	114.08%	114.08%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. KPKNL Palopo selalu berusaha menyelesaikan layanan kekayaan Negara lebih cepat dari SOP waktu standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, pemangkasan waktu layanan tersebut akan dibuatkan SOP kembali, sehingga dapat lebih tertib dalam pelaksanaannya, hal tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya KPKNL Palopo dalam mewujudkan kantor berpredikat WBK di tahun 2022.
- b. KPKNL Palopo telah membuat dan menggunakan aplikasi internal (SIKASIH) memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sederhana yaitu google drive, yang berfungsi mengkoordinasikan tugas bendahara penerima yang manatausahakan rekening penampungan, dengan unit/fungsi teknis seperti layanan lelang dan pengurusan piutang, sehingga uang yang masuk melalui bendahara penerima terkait kegiatan layanan lelang dan pengurusan piutang, dapat dilakukan update dan monitoring pencatatannya secara bersama-sama.

Demikian kami sampaikan capaian Indeks Ketepatan waktu layanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



5. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama

2b-CP- Persentase realisasi pokok lelang

Persentase pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP- Persentase realisasi pokok lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Capaian	8.75%	110.81%	110.81%	150.30%	150.30%	203.04%	203.04%	

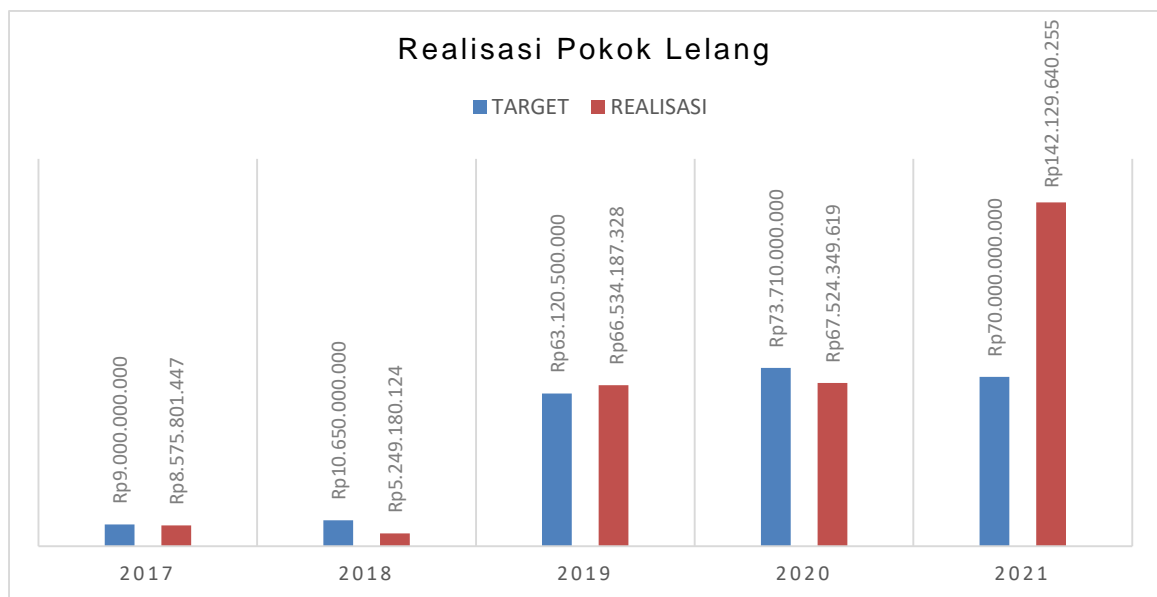


Realisasi (Rp)	6,128,172,451.00	77,563,715,205.00	77,563,715,205.00	105,206,979,725.00	105,206,979,725.00	142,129,640,255.00	142,129,640,255.00
Index max 120 %	43.77%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang online;
- Melakukan penggalian potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemda, dan satker di lingkungan KPKNL Palopo.

Demikian kami sampaikan capaian Persentase realisasi pokok lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



6. Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator Kinerja Utama

3a-CP- Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut:

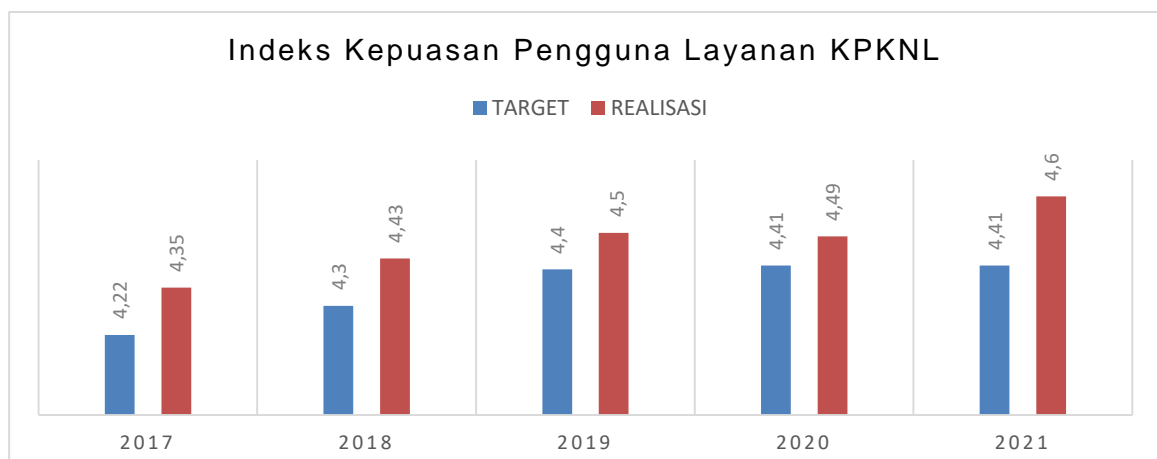


K-Wide	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	3a-CP- Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target						4.41	4.41	Max/TLK
Capaian						4.60	4.60	
Realisasi						4.60	4.60	
Index max 120 %						104.25%	104.25%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. KPKNL Palopo selalu berusaha menyelesaikan layanan kekayaan Negara lebih cepat dari SOP waktu standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, pemangkasan waktu layanan tersebut akan dibuatkan SOP kembali, sehingga dapat lebih tertib dalam pelaksanaannya, hal tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya KPKNL Palopo dalam mewujudkan kantor berprediket WBK di tahun 2022
- b. KPKNL Palopo selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan dan membuka jalur untuk menerima *feedback* dari pelayanan yang telah diberikan, dalam rangka mewujudkan perbaikan layanan secara terus menerus.

Demikian kami sampaikan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL dalam kurun waktu lima tahun terakhir.





7. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Indikator Kinerja Utama

4a-CP- Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan;

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah sebagai berikut:

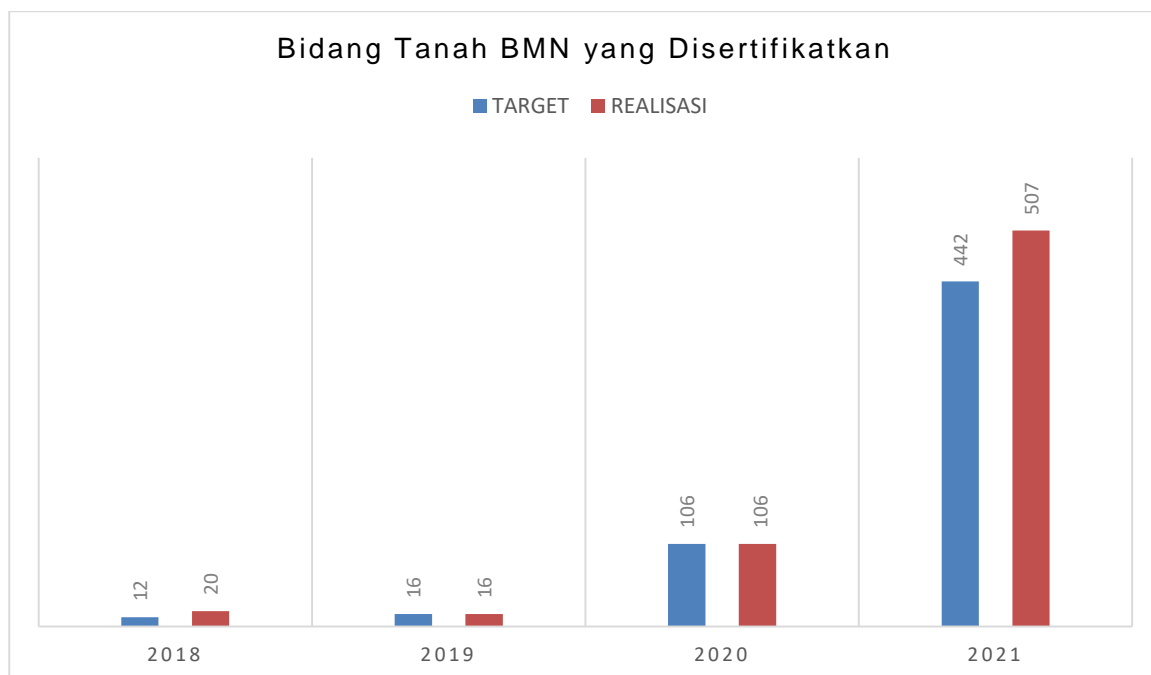
K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4a-CP- Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target		20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Capaian		33.71%	33.71%	62.44%	62.44%	114.71%	114.71%	
Realisasi		149	149	276	276	507	507	
Index max 120 %		120%	120%	104.07%	104.07%	114.71%	114.71%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :



- a. Melakukan koordinasi secara intens dengan kantor-kantor pertanahan terkait yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Palopo
- b. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah secara rutin dengan pihak kantor pertanahan dan satker

Demikian kami sampaikan capaian Bidang tanah BMN yang disertifikatkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



8. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Indikator Kinerja Utama

4b-CP- Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) adalah sebagai berikut:



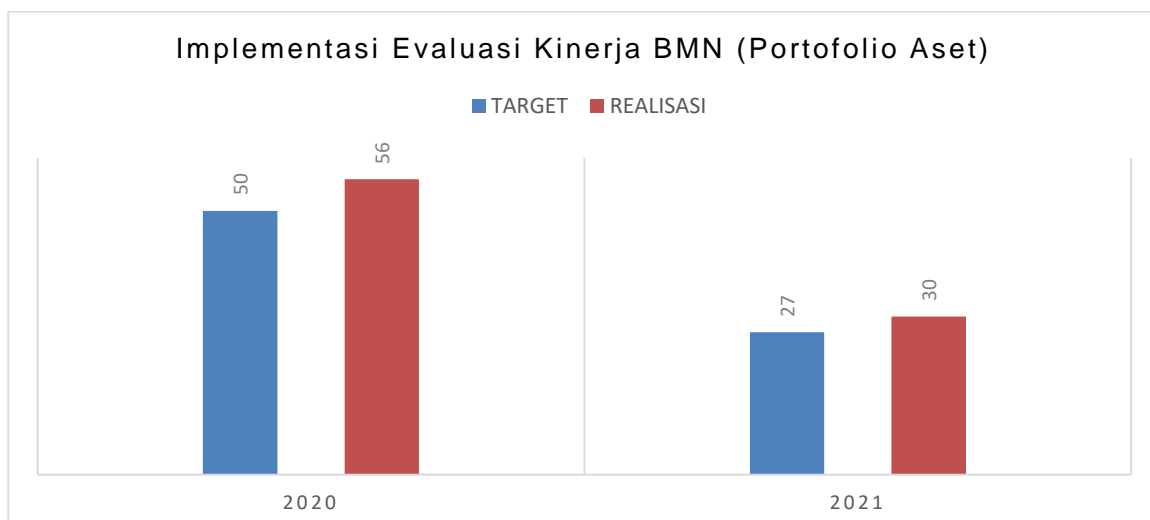
Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4b-CP- Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/TL
Capaian	18.52 %	77.78 %	77.78 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	K
Realisasi	5	21	21	30	30	30	30	
Index max 120 %	120%	120%	120%	120%	120%	111.11 %	111.11 %	

sebagai berikut :

- 1) melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN.
- 2) melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan.
- 3) melakukan survei lapangan dalam rangka evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Demikian kami sampaikan capaian implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dalam kurun waktu dua tahun terakhir.





9. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Indikator Kinerja Utama

4c-CP- Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4c-CP- Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	MIN/TLK
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.90%	0.00%	0.23%	
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.90%	0.00%	0.23%	

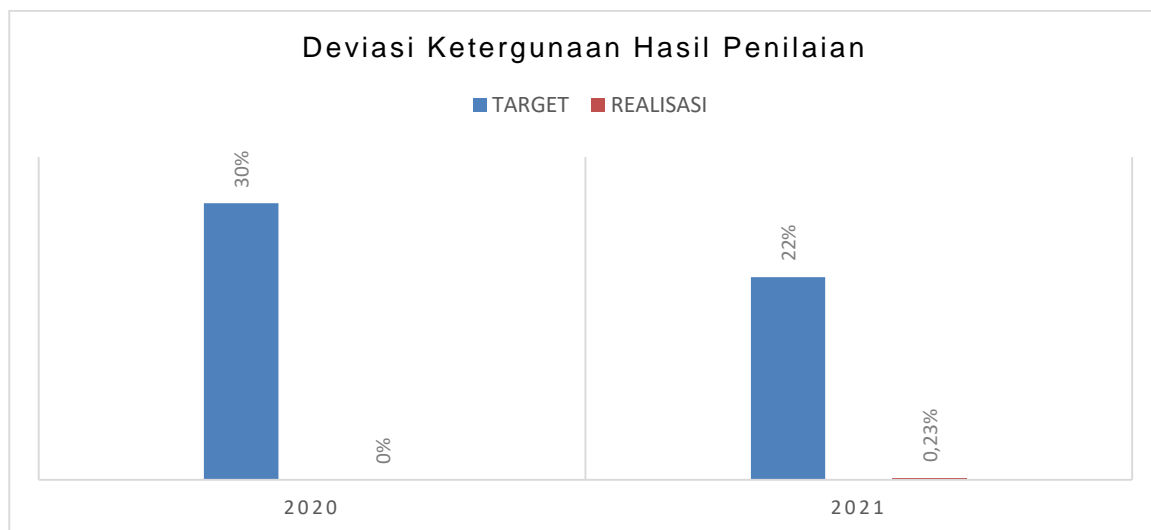


Index								
max 120	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
%								

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorotalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan proses penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan penilaian;
- 2) Melakukan pembinaan kepada satker terkait usulan nilai taksiran harga yang dijadikan usulan dalam rangka permohonan penghapusan BMN dan pemanfaatan BMN.

Demikian kami sampaikan capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam kurun waktu dua tahun terakhir.



10. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja Utama

5a-CP- Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target tahun 2021 adalah 12 (dua belas) berkas.



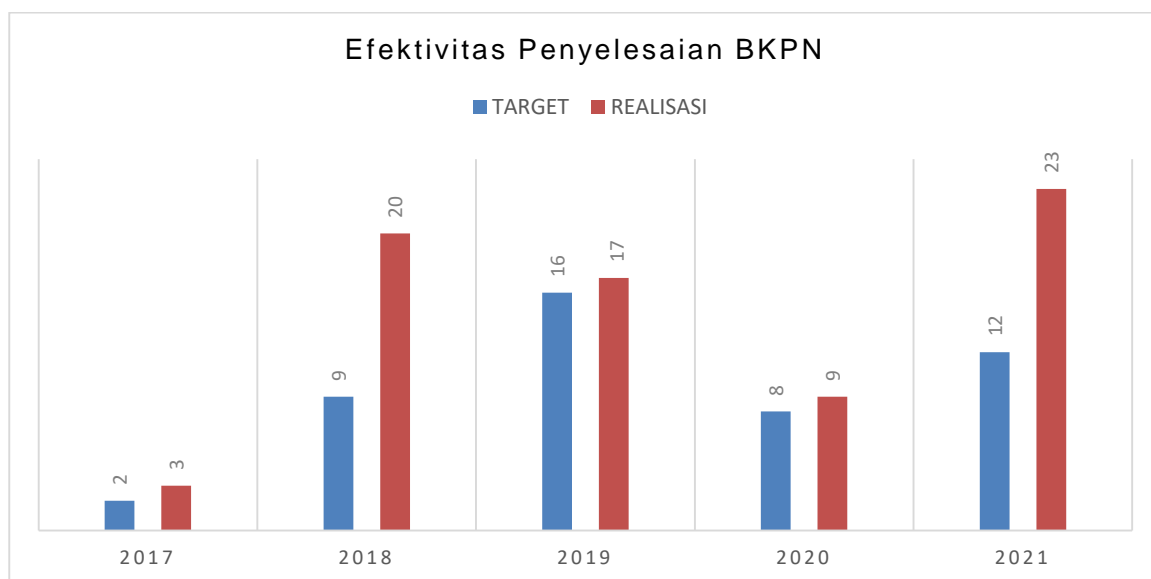
Capaian IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP- Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	25%	91.67%	91.67%	183.33%	183.33%	191.67%	191.67%	
Realisasi	3	11	11	22	22	23	23	
Index max 120 %	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) mensosialisasikan secara massif terkait adanya crash program piutang Negara melalui berbagai sarana.
- 2) melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.
- 3) melakukan kegiatan penagihan langsung kepada debitur.

Demikian kami sampaikan capaian Efektifitas Penyelesaian BKPN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.





11. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif Indikator Kinerja Utama

5b-CP- Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

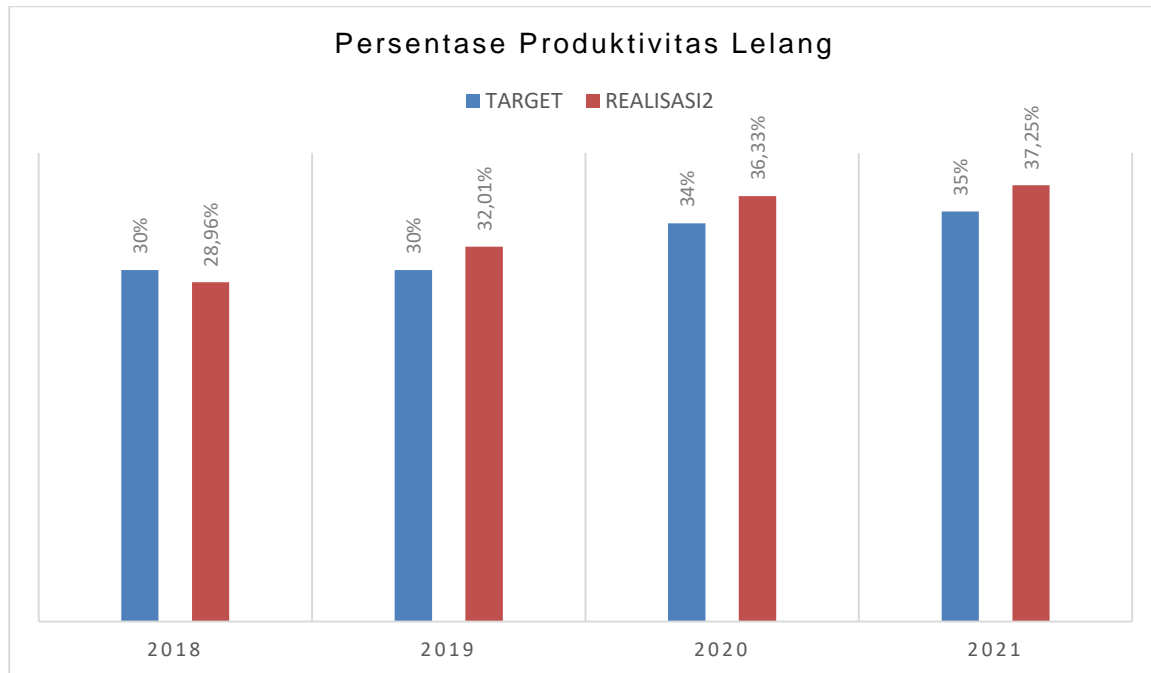
Capaian IKU Persentase produktivitas lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP- Persentase produktivitas lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35.00%	35.00%	Max/TLK
Capaian	25,81%	30.20%	30.20%	32.46%	32.46%	37.25%	37.25%	
Realisasi	25,81%	30.20%	30.20%	32.46%	32.46%	37.25%	37.25%	
Index max 120 %	120%	120%	120%	120%	120%	106.44%	106.44%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan calon pemohon lelang agar pemohon lelang memprioritaskan untuk mengajukan objek lelang yang *marketable*.
- 2) Melakukan penyampaian informasi pengumuman lelang kepada masyarakat agar mengikuti lelang melalui berbagai saluran media informasi termasuk media sosial.
- 3) Membuat database nilai wajar BMN dan harga lelang BMN tersebut agar hasil penilaian yang dijadikan dasar persetujuan penjualan BMN dapat mencerminkan nilai wajar/pasar yang sebenarnya.

Demikian kami sampaikan capaian Persentase produktivitas lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



12. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif Indikator Kinerja Utama

5c-CP- Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

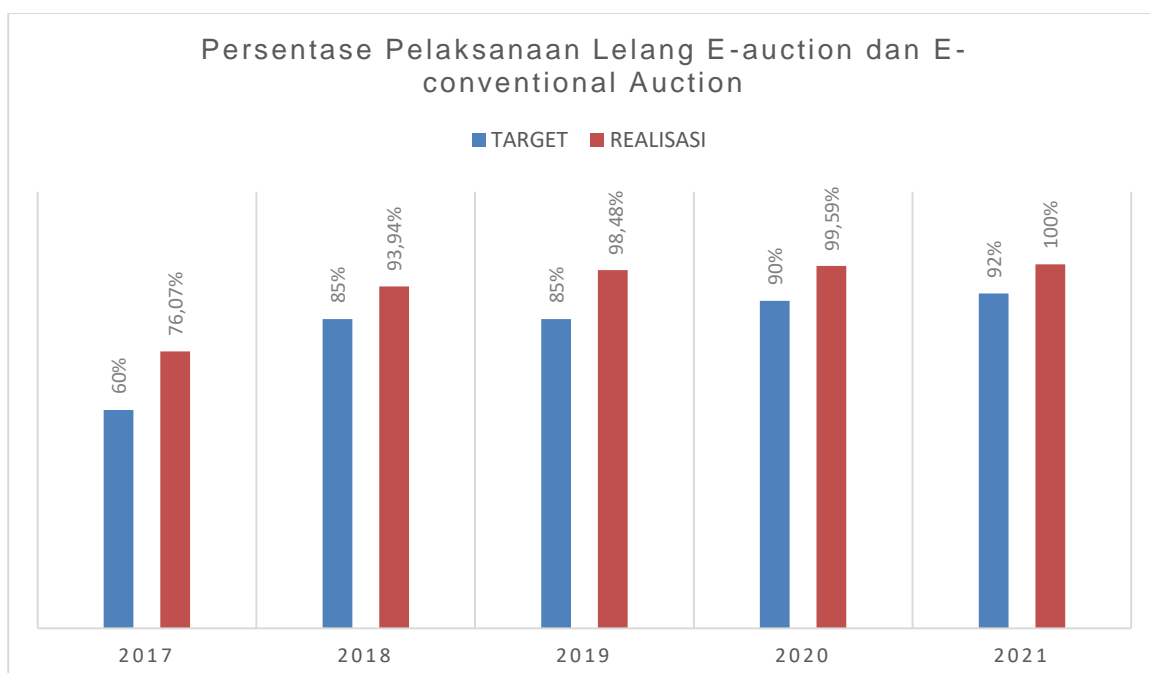
Capaian IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebagai berikut:



K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP- Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Index max 120 %	108.70%	108.70%	108.70%	108.70%	108.70%	108.70%	108.70%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo selalu mengedukasi dan mendorong kepada pemohon lelang, agar pelaksanaan lelang dilakukan secara e-auction, memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, dimana penggunaan sarana e-auction ini dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya calon pembeli bisa melakukan penawaran secara lebih fleksibel dimana saja, lebih transparan dan lebih aman.

Demikian kami sampaikan capaian Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dalam kurun waktu lima tahun terakhir.





13. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja Utama

5d-CP- Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%, sedangkan target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah sebagai berikut:

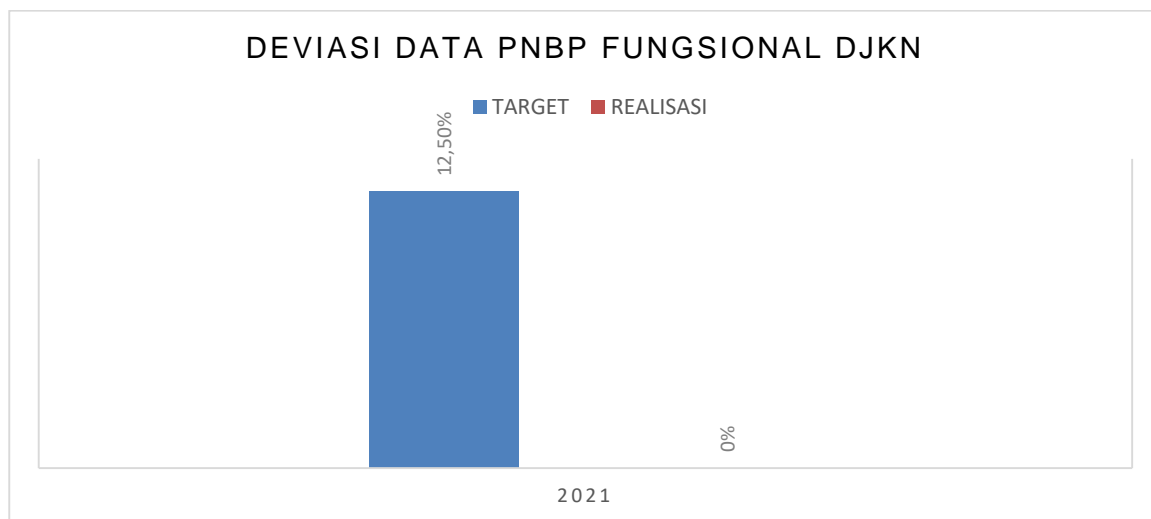
K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5d-CP- Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	MIN/TLK
Capaian	0.60%	0.11%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Realisasi	0.60%	0.11%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Index max 120 %	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah membuat dan menggunakan aplikasi internal (SIKASIH) memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sederhana yaitu google drive, yang berfungsi mengkoordinasikan tugas bendahara penerima yang manatausahakan rekening penampungan, dengan unit/fungsi teknis seperti layanan lelang



dan pengurusan piutang, sehingga uang yang masuk melalui bendahara penerima terkait kegiatan layanan lelang dan pengurusan piutang, dapat dilakukan update dan monitoring pencatatannya secara bersama-sama.

Demikian kami sampaikan capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dalam kurun waktu satu tahun terakhir.



14. Sasaran Strategis Edukasi Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama

6a-N- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.



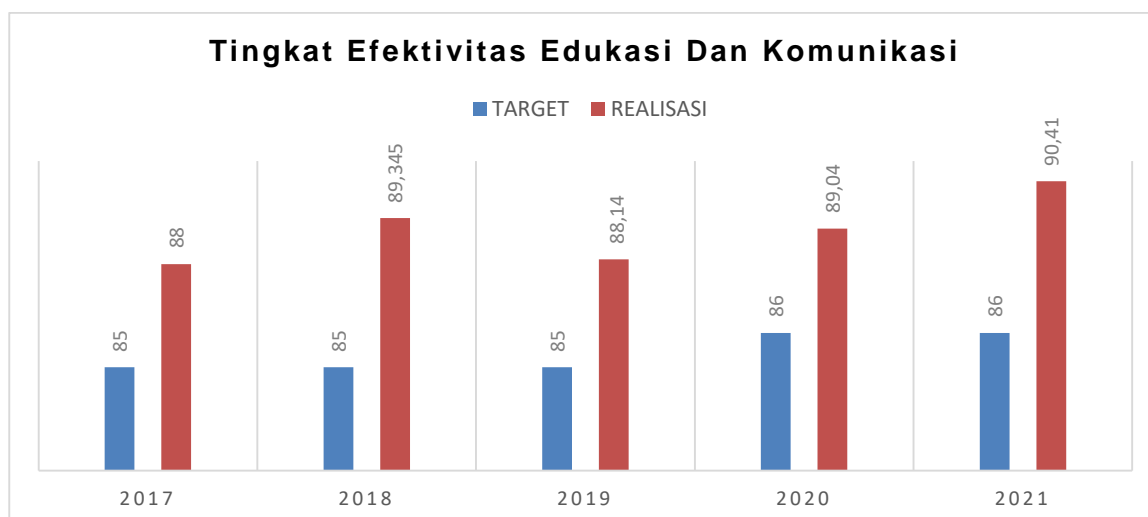
Capaian IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

K-Wide	Edukasi yang efektif							
	6a-N- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target						86	86	Max/TLK
Capaian						90.41	90.41	
Realisasi						90.41	90.41	
Index max 120 %						105.12%	105.12%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tuisi-tuisi yang ada di KPKNL kepada pengguna layanan;
- 2) Selalu berupaya memberikan edukasi terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian layanan oleh KPKNL kepada pengguna jasa;
- 3) Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna jasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian kami sampaikan capaian tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.





15. Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Indikator Kinerja Utama

7a-CP- Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

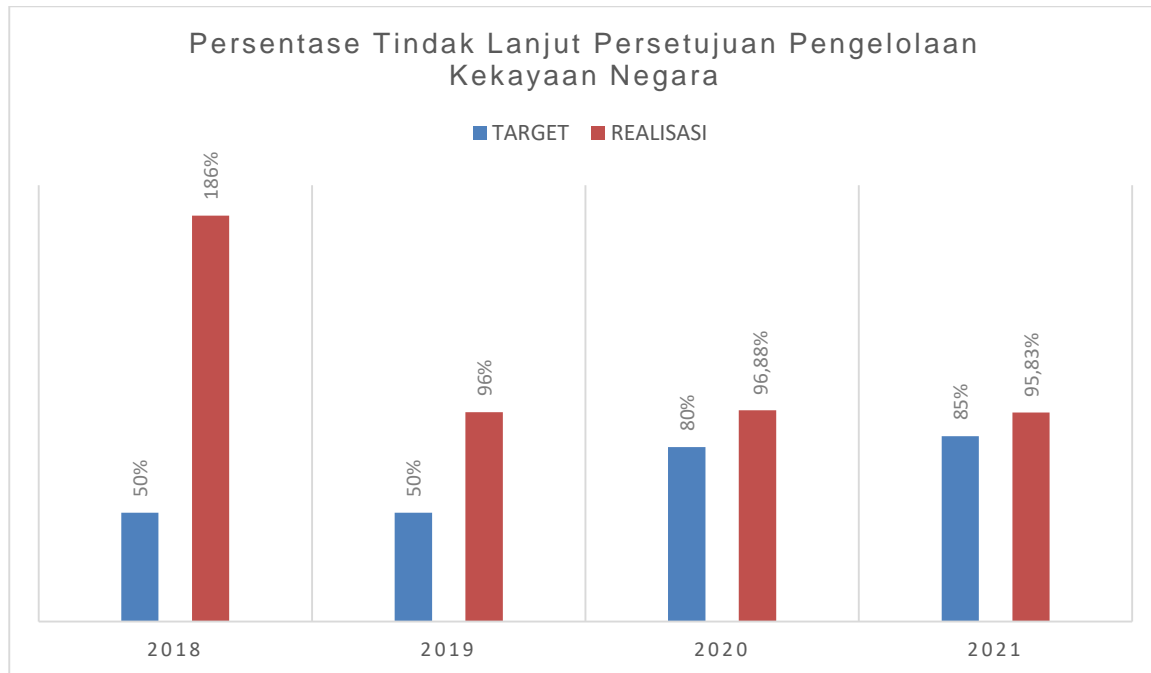
Capaian IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	7a-CP- Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target		40.00%	40.00%			85%	85%	Max/TLK
Capaian		95.83%	95.83%		95.83%	95.83%	95.83%	
Realisasi		95.83%	95.83%		95.83%	95.83%	95.83%	
Index max 120 %		120%	120%			112.75%	112.75%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) selalu mengingatkan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan lewat waktu.
- 2) Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah satker lakukan antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNBPN sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Demikian kami sampaikan capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



16. Sasaran Strategis SDM yang kompeten

Indikator Kinerja Utama

8a-N- Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

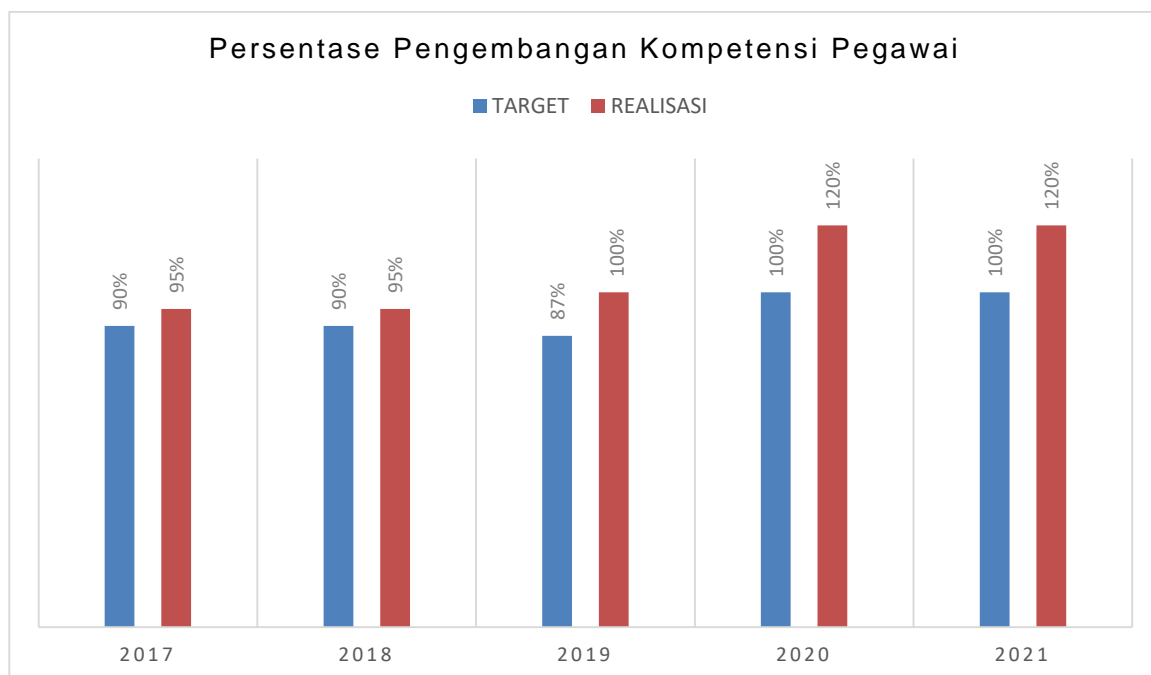
K-Wide	SDM yang kompeten							
	8a-N- Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100%	100%	Max/TLK
Capaian	21.18%	60.00%	60.00%	108.00%	108.00%	120%	120%	
Realisasi	21.18%	60.00%	60.00%	108.00%	108.00%	120%	120%	
Index max 120 %	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Gorotalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat database terkait rekapitulasi data diklat/klc yang telah diikuti oleh para pegawai;
- b. Selalu mengingatkan kepada para pegawai untuk mengisi usulan diklat pada saat dilakukan DKI;
- c. Selalu mendorong pegawai untuk mengikuti diklat/klc dalam rangka pengembangan kompetensi masing-masing pegawai.

Demikian kami sampaikan capaian Persentase pengembangan kompetensi pegawai dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



17. Sasaran Strategis Organisasi yang fit for purpose

Indikator Kinerja Utama

9b-N- Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.



Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

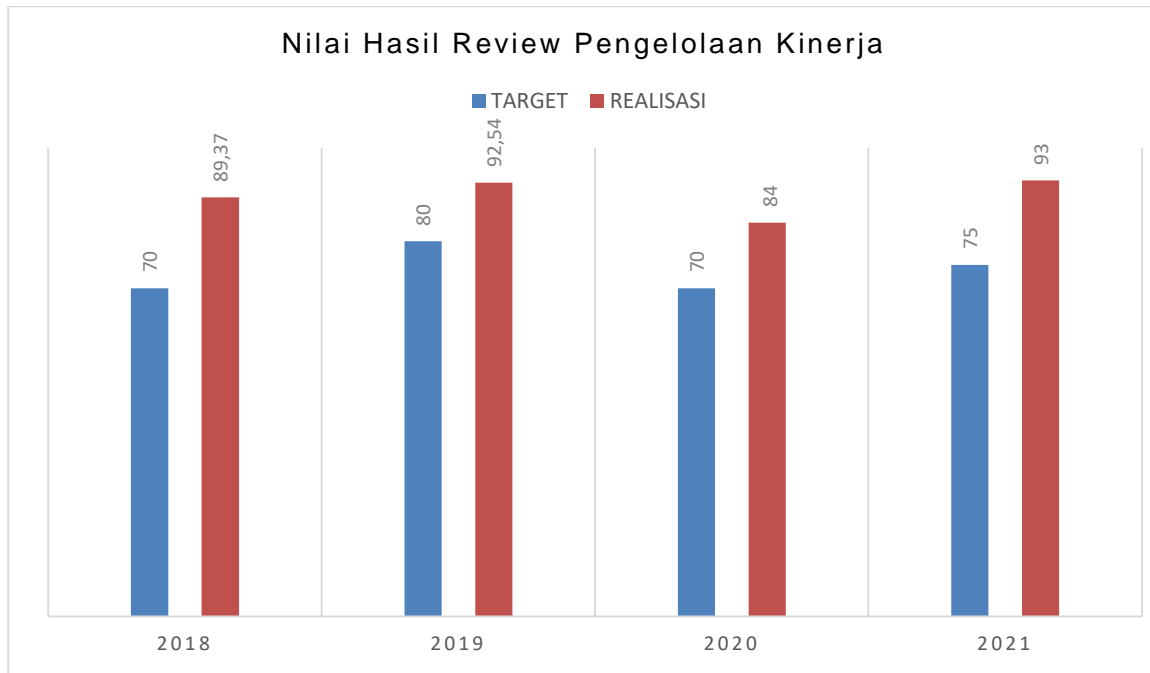
Capaian IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut:

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose							
	9b-N- Nilai hasil review pengelolaan kinerja							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target						75	75	Max/TLK
Capaian						92.61	92.61	
Realisasi						92.61	92.61	
Index max 120 %						120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan internalisasi terkait pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai;
- 2) Menyusun dan melakukan penatausahaan dokumen kinerja dengan baik;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara rutin;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi masing-masing seksi/subbag dalam rangka pencapaian target kinerja.

Demikian kami sampaikan capaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



18. Sasaran Strategis Organisasi yang fit for purpose

Indikator Kinerja Utama

9c-N- Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU yang telah ditetapkan.

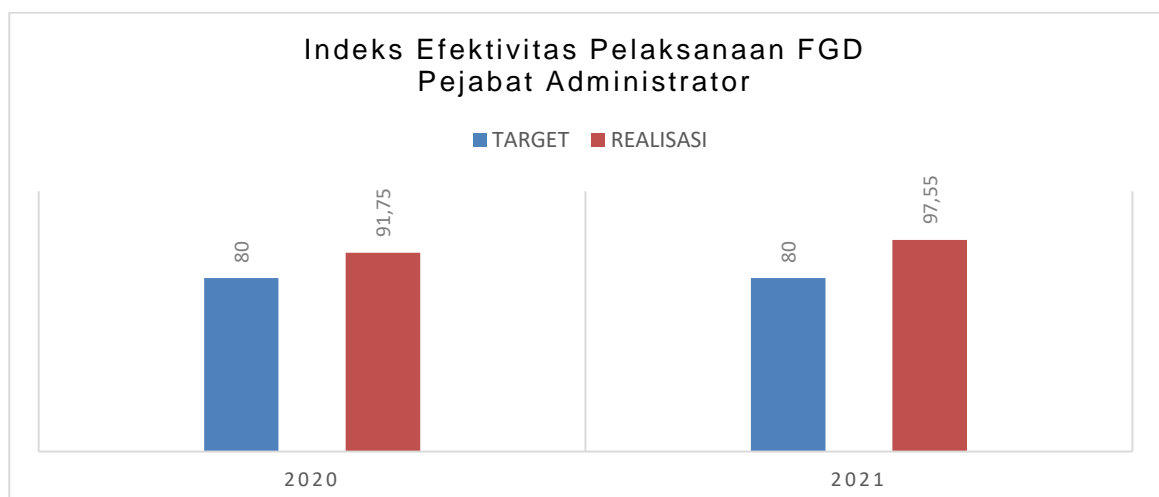


Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah sebagai berikut:

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose							
	9c-N- Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Capaian	96.60	95	95.8	99	96.87	99.6	97.55	
Realisasi	96.60	95	95.8	99	96.87	99.6	97.55	
Index max 120 %	120%	119.75%	119.75%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah antara lain secara rutin menyampaikan informasi kepada para pegawai KPKNL Palopo agar dapat secara cepat dan akurat menerima informasi yang benar, sehingga dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru. Informasi tersebut tidak hanya terkait kode etik pegawai tetapi tema lain yang berkaitan dengan tugas fungsi Kemenkeu secara umum antara lain terkait kondisi APBN dan lain sebagainya.

Demikian kami sampaikan capaian Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dalam kurun waktu dua tahun terakhir.





19. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Indikator Kinerja Utama

10a-CP- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

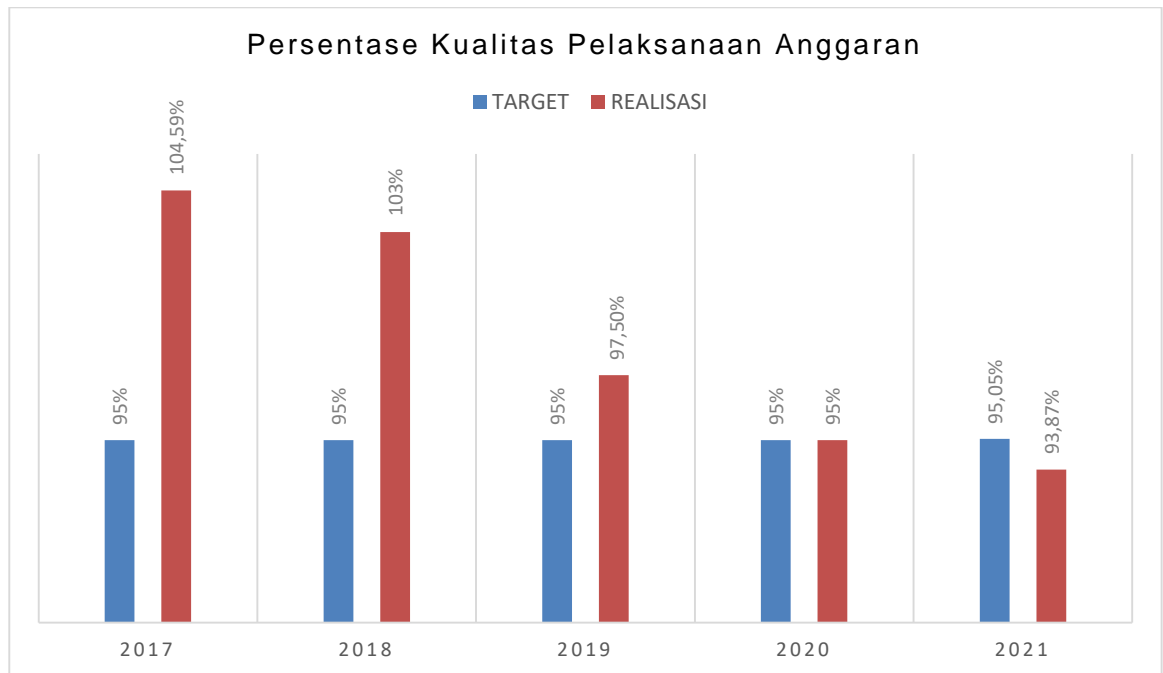
K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	95.05%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	Max/TLK
Capaian	91.77%	93.09%	93.09%	95.39%	95.39%	93.87%	93.87%	
Realisasi	91.77%	93.09%	93.09%	95.39%	95.39%	93.87%	93.87%	
Index max 120 %	96.55%	97.48%	97.48%	99.88%	99.88%	98.29%	98.29%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dengan cermat.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output secara rutin.
- 3) Melakukan monitoring capaian IKPA pada aplikasi OM SPAN.
- 4) Melakukan koordinasi dengan KPPN Palopo terkait progres capaian IKPA



Demikian kami sampaikan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

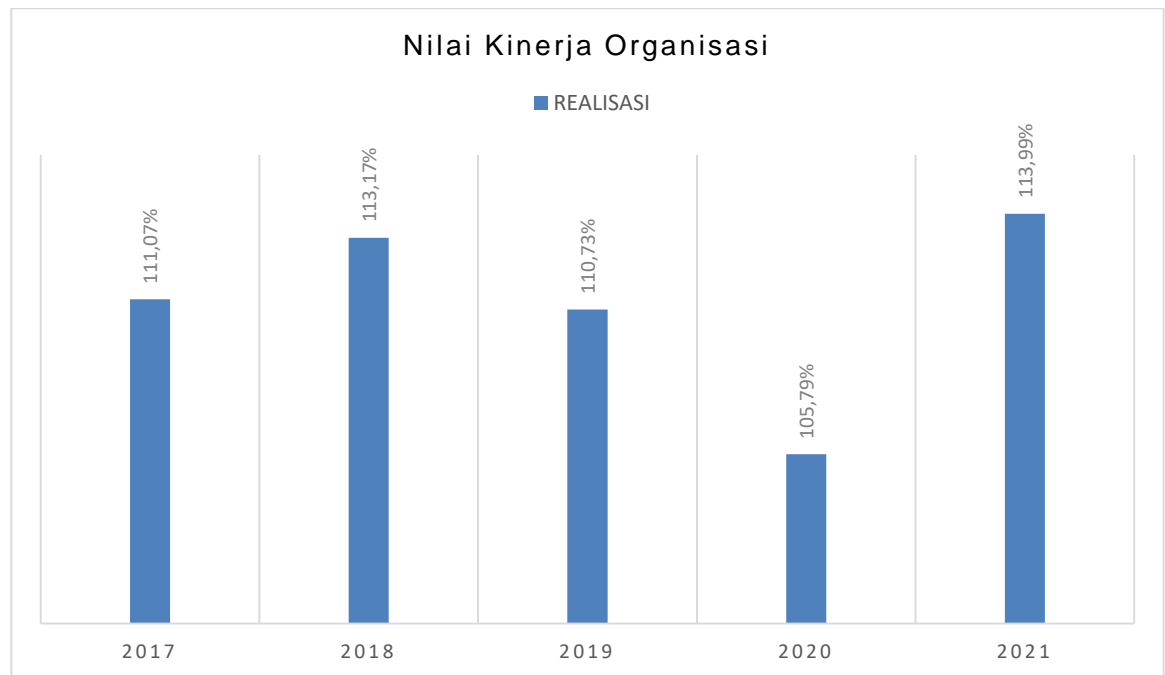


20. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo tahun 2021 adalah sebesar 113,99%.

NKO pada tahun 2020 mengalami penurunan yang apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini diakibatkan terjadinya pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada beberapa IKU sehingga mempengaruhi nilai akhir NKO. Pada tahun 2021 NKO KPKNL Palopo mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan NKO pada tahun 2020. Capaian NKO pada tahun 2021 merupakan nilai tertinggi yang berhasil dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir

Demikian kami sampaikan capaian Nilai Kinerja Organisasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Kondisi tersebut coba diatasi oleh KPKNL Palopo dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan jajarannya, untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, yang meliputi Barang Milik Negara belum memiliki dokumen kepemilikan, Barang Milik Negara dikuasai pihak lain, Barang Milik Negara dalam sengketa, Barang Milik Negara belum ditemukan, Barang Milik Negara yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan Barang Milik Negara rusak berat tetapi belum dihapuskan.

Terhadap hal tersebut, KPKNL Palopo berusaha mengedukasi para satker, misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikuti program sertifikasi terutama untuk yang clean dan clear, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, maka satker perlu intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Palopo mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau



dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tuisi. Sedangkan terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Palopo mendorong satker untuk melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tuisi satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

3. Pelaksanaan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah terkendala oleh data tanah target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid.

Terhadap permasalahan ini KPKNL Palopo melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertipikat atas BMN.

4. Pemahaman peraturan yang tidak merata maupun tidak memadai, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda.

KPKNL Palopo melakukan sharing knowledge baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, sehingga harapannya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*.

Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker, baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu siaga melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.

6. Terdapat debitur yang tidak diketahui keberadaannya karena menetap diluar negeri dan barang jaminan milik debitur tidak dapat dilakukan sita, serta terdapat beberapa debitur yang tidak kooperatif ketika ditagih.

KPKNL Palopo telah melakukan dan mengedepankan upaya-upaya pendekatan secara persuasif kepada debitur dalam rangka melakukan penagihan. KPKNL juga intens melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan kondisi barang jaminan. KPKNL juga secara massif dan persuasif mensosialisasikan adanya program keringanan hutang bagi debitur yang memenuhi persyaratan, sehingga dampaknya banyak debitur yang mengikuti program keringanan hutang dan melunasi kewajiban-kewajibannya.



7. Pihak penjual menetapkan nilai limit di atas nilai wajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama agar objek lelang terjual. Biasanya hal tersebut dilatarbelakangi motif penjual yang mengajukan lelang hanya untuk melakukan *shock therapy* agar debitur mau melakukan pembayaran.

KPKNL Palopo berupaya untuk melakukan komunikasi kepada penjual dalam hal ini perbankan, untuk dapat memprioritaskan pengajuan lelang yang sudah memiliki potensi pembeli.

8. Objek lelang masih dihuni oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga masyarakat tidak berminat atas lelang dimaksud (objek lelang belum *clean and clear*).

KPKNL Palopo telah melakukan publikasi melalui berbagai media baik online maupun secara langsung kepada masyarakat bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL, memang secara prinsip untuk fisik, kondisinya adalah *as is* atau apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *anwijzing* atau secara mandiri, namun KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik *as is*, tetapi secara dokumen formil, telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli. Dengan adanya e-auction, pelaksanaan lelang juga dipastikan berjalan secara lebih *fair* dan transparan.

9. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (*end user*) dan belum sampai tahap investasi.

KPKNL Palopo di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi online maupun dalam pertemuan dengan para stakeholder, berupaya untuk terus mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan di masa depan, mengingat relatif lebih aman dibandingkan dengan jual beli konvensional, dan dengan dukungan teknologi melalui e-auction, selaras dengan kondisi perkembangan jaman.

RENCANA KERJA KPKNL PALOPO 2022

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, target yang diharapkan dapat dicapai tahun 2022 serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, dan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, maka KPKNL Palopo memiliki rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara



- a. Melakukan bimtek untuk satker terkait dengan pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK serta terkait implementasi portofolio aset, baik melalui media daring maupun luring.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif, termasuk dalam hal mendorong satker untuk optimalisasi penggunaan aset, maupun melalui pemanfaatan aset.
- c. Percepatan sertifikasi BMN, dengan melakukan pendampingan kepada satker, dari awal tahap proses sertifikasi hingga proses selesai, serta mengintensifkan komunikasi dalam rangka koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan baik di internal maupun kepada eksternal melalui edukasi kepada satker.

2. Peningkatan pelayanan penilaian

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, wawasan penilai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan, diskusi berkala, *knowledge sharing* di bidang penilaian.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholder*, guna meminimalisir kendala dalam pelaksanaan penilaian.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperoleh data/informasi/transaksi (harga) tanah/bangunan yang mereka miliki, serta mengumpulkan data-data transaksi atau penawaran tanah di lingkungan wilayah kerja KPKNL Palopo, untuk selanjutnya dapat dibuat database guna melengkapi DKPB yang telah disusun.
- d. Melaksanakan penilaian yang berkualitas sesuai dengan tenggat waktu dan keakuratan dalam penilaian.

3. Optimalisasi pengurusan piutang Negara

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan penyerah piutang, terkait dengan adanya kendala dalam proses pengurusan piutang atas BKPN yang ada.
- b. Melakukan penggalian potensi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan penyerah piutang lainnya.
- c. Memaksimalkan proses penagihan dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif.

4. Peningkatan pelayanan lelang

- a. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Palopo antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun



pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non Eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan :

1. Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalian potensi lelang dengan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna layanan.
 2. Pembuatan Data Base Pelaksanaan Lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Palopo.
- b. Sosialisasi penggunaan dan pelaksanaan lelang melalui www.lelang.go.id kepada *stakeholder* melalui saluran-saluran media yang tersedia.
- c. Meningkatkan Kompetensi Pejabat Lelang (dhi. Jafung Pelelang), dengan mengikuti *capacity building*, pendidikan/pelatihan dan *knowledge sharing* bagi Pejabat Lelang.

5. Implementasi kantor menuju zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

- a. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang bebas dari korupsi, yang harus dimiliki oleh segenap jajaran pegawai ASN di lingkungan KPKNL Palopo, baik ASN PNS maupun non PNS.
- b. Melakukan publikasi yang optimal mengenai pembentukan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi KPKNL Palopo kepada *stakeholder* melalui berbagai media informasi baik cetak, melalui spanduk/pamflet maupun secara elektronik, misalnya melalui media social.
- c. Inovasi atas layanan unggulan kepada *stakeholder*, baik inovasi berupa pemangkasan waktu layanan, maupun inovasi program berbasis kegiatan, atau berbasis penggunaan media aplikasi.
- d. Membuka layanan pengaduan atau kotak saran dan masukan atas kinerja KPKNL Palopo baik secara fisik, maupun melalui media elektronik.
- e. Menjalin *intimacy* dengan *stakeholder* pengguna layanan melalui berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan, baik secara online maupun offline.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Dalam tahun 2021, anggaran belanja KPKNL Palopo telah direalisasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2021:



Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi	Realisasi s.d. Des 2021
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	Rp 1.608.868.000	Rp 1.167.380.000	Rp 1.146.035.632
Belanja Modal	Rp 713.544.000	Rp 690.430.000	Rp 687.504.300
<i>Self-blocking</i>	-	-	-
Dana Khusus	-	-	-
Total	Rp 2.322.412.000	Rp 1.857.810.000	Rp 1.833.539.932

BAB IV

PENUTUP



KPKNL
PALOPO



BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo pada tahun 2021 secara umum dapat dikatakan baik, dan dari target 19 (sembilan belas) IKU yang telah ditetapkan, secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,99%.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Palopo untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya KPKNL Palopo tahun 2022 yang akan mewujudkan kantor Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini diakui masih banyak kekurangan, KPKNL Palopo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk segala perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**KPKNL
PALOPO**



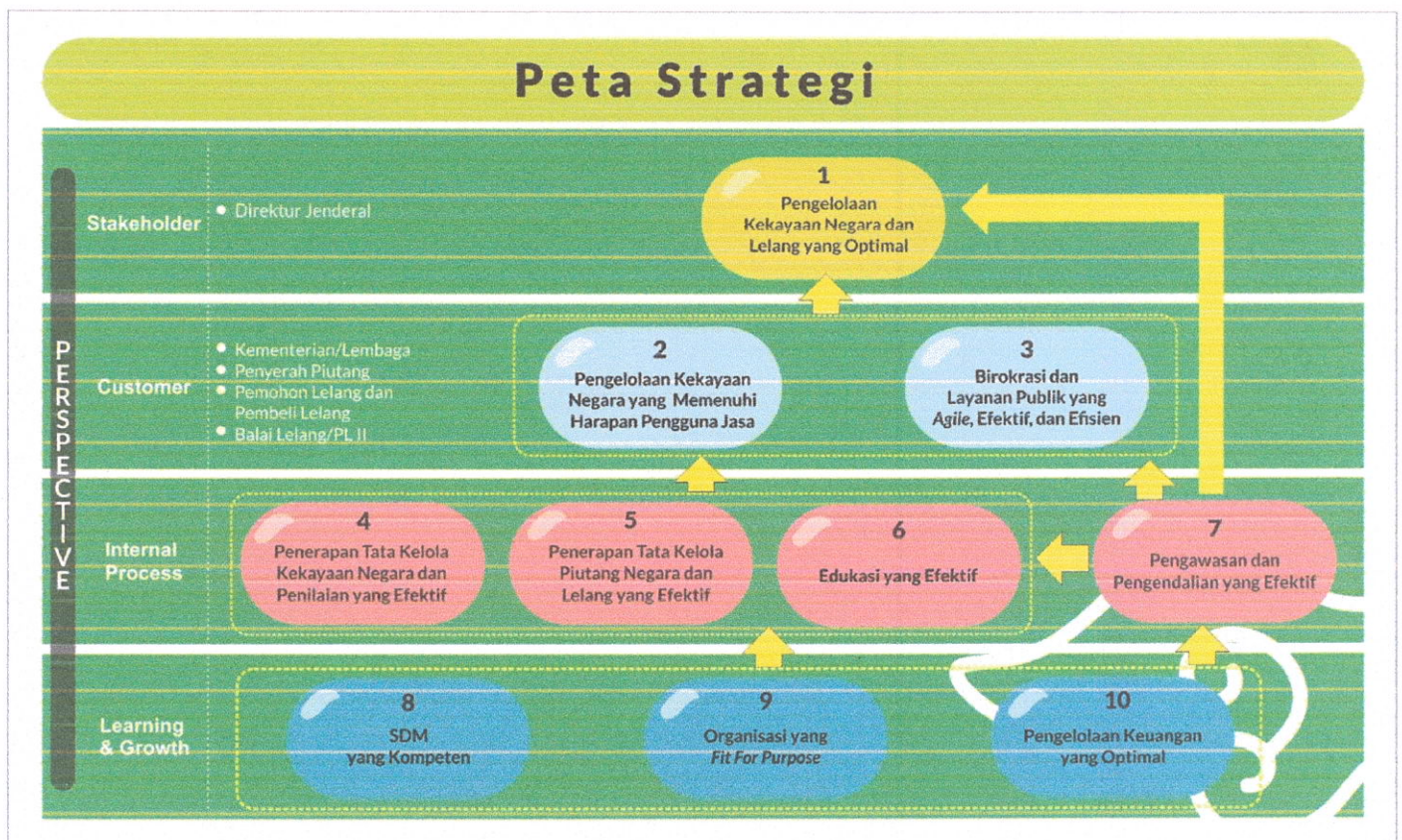
KONTRAK KINERJA
NOMOR 10/KN.27/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
KANTOR WILAYAH DJKN SULSELTRABAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
KANTOR WILAYAH DJKN SULSELTRABAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	86
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,41
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	86
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	155.248.000.
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	15.574.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	13.196.000
3. Pengelolaan Aset	126.478.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	0
Dukungan Manajemen	2.167.164.000
1. Legislasi dan Litigasi	25.808.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.107.435.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	18.165.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	0
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15.756.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	0

Makassar, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar,

Ekka Sri Sukadana

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palopo

Ya'kub

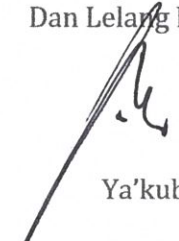
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
KANTOR WILAYAH DJKN SULSELTRABAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	86	86	86	86	86	86	86
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	-	4,41
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	-	86
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Makassar, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Palopo



Ya'kub

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Ekka Sri Sukadana	1	Nama	Ya'kub
2	NIP	196212171992031001	2	NIP	196512281991031002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV.d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk. I /IV.b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	4	Jabatan	Kepala Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	86	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,41	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	86	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
18	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
19	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp. 2.322.4 12.000

Makassar, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,

Ekka Sri Sukadana
NIP 196212171992031001

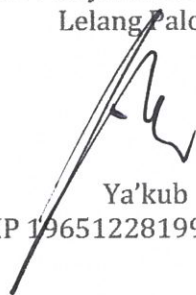
PNS yang Dinilai,

Ya'kub
NIP 196512281991031002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
KANTOR WILAYAH DJKN SULSELTRABAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel IKU: Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	Rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat	Laporan penyelesaian; Sertipikat tanah	Seksi PKN	Rp 23.424.000,00

Makassar, Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Palopo


Ya'kub
NIP 196512281991031002

**LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo, untuk periode Kontrak Kinerja tahun 2020 yang meliputi:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
- b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)
- c. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara;
- d. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang;
- e. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
- f. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL;
- g. Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi;
- h. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- i. Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian;
- j. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
- k. Persentase Produktivitas Lelang
- l. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
- m. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN
- n. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
- o. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
- p. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- q. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja
- r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
- s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 Januari 2021

Plt. Kepala Bidang Kepatuhan
Internal, Hukum, dan Informasi

Cahyo Windu Wibowo
NIP 19740525199602 1 001

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Palopo

Ya'kub
NIP 19651228 199103 1 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Palopo
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	100.00%	120.00%
		Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang	100%	148.81%	120.00%
		Persentase penurunan outsourcing piutang Negara (saldo PNDS sd. 2017)	100%	692%	120.00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan Negara dan lelang	86.00	98.11	114.08%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Persentase realisasi pokok lelang	100%	203.04%	120.00%
		Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.41	4.60	104.25%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	114.71%	114.71%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (potofolio aset)	100%	111.11%	111.11%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0.23%	120.00%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	191.67%	120.00%
		Persentase produktifitas lelang	35.00%	37.25%	106.44%

		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	100.00%	108.70%
6	Edukasi yang efektif	Deviasi data PNPB fungsional DJKN	12.50%	0.00%	120.00%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	86	90.41	105.12%
8	SDM yang kompeten	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%	95.83%	112.75%
9	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
		Nilai hasil review pengelolaan kinerja Administrator	75%	92.61	120.00%
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97.55	120.00%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	93.87%	98.29%



Gambar 1 Koordinasi Kepala KPKNL Palopo dengan UPT Samsat Palopo



Gambar 2 Koordinasi Kepala KPKNL Palopo dengan Kantor Pos Palopo



Gambar 3 Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal



Gambar 4 Penyerahan Jaminan Crash Program



Gambar 5 Penandatanganan Kontrak Kinerja



Gambar 6 Kegiatan Vaksinasi Covid-19



Gambar 7 Forum Group Discussion Triwulan IV



Gambar 8 Rapat Bulanan



Gambar 9 Penyerahan Barang Lelang Gratifikasi kepada Pembeli



Gambar 10 Cerdas Cermat dalam rangka HUT DJKN



Gambar 11 Rapat Pemaparan Rencana Penggunaan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Lampia



Gambar 12 Rapat Pemaparan Rencana Penggunaan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Lampia



Gambar 13 Koordinasi dengan Dinas Koperasi , UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo



Gambar 14 Foto Produk untuk Lelang UMKM



Gambar 15 Juara 1 Lomba Foto UMKM Hari Oeang 75



Gambar 16 Juara 1 Lomba Poster Carnival Penilaian